




POLICY ANALYSIS ON STUNTING REDUCTION AND ITS IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN SIKKA REGENCY

Samsul Hidayat Syahbandan ¹, Nikson Tameno ², Novi Theresia³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, (Kupang, 85148)

* Corresponding Author: Ssyahbanda@gmail.com

| ARTICLE INFO | ABSTRACT |
|---|---|
| <p>Articles History: Accepted tgl. 21/06/2025 Repaired tgl. 25/06/2025 Approved tgl. 27/06/2025 Available online tgl. 27/06/2025</p> | <p>The objective of this study is to examine the stunting reduction policy and its challenges in relation to economic development in Sikka Regency. The research method used is descriptive qualitative. The findings show that the implementation of the stunting reduction policy includes programs such as the "Pripong Abong" Adolescent Posyandu, the Foster Parents Movement, and the "Lepo Gahar Naha Blisa" or stunting recovery house. These initiatives involve multiple stakeholders and go through several critical stages, including engagement from governmental and non-governmental organizations as well as the community as the main target group. The policy is designed to reduce stunting prevalence through programs outlined in the Sikka Regency Regent Regulation, focusing on nutritional interventions, improved healthcare services, and community education as key aspects. The provision of financial resource support to the community has positively impacted the implementation of the policy, which has generally been proceeding well. However, there are several challenges to implementing the stunting reduction policy and its contribution to economic development in Sikka Regency. High levels of isolation result in limited access to essential services such as healthcare and education, which increases the community's vulnerability to poverty and underdevelopment. Poor road access to Posyandu centers poses another obstacle for community members to participate in government programs. Furthermore, strong belief in myths and traditional practices among residents hinders the effective implementation of stunting prevention efforts in the region.</p> |
| <p>ISSN-E: 2962-4746 ISSN-P: 2961-8312</p> | |
| <p>DOI: 10.58290/jmbo.v4i1.436</p> | <p>Keywords: Policy, Stunting Reduction, Economic Development</p> |
| <p> ©2025. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)</p> | |

PENDAHULUAN

Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh masalah gizi yang sedang terjadi di dunia saat ini. Prevalensi stunting yang sangat tinggi

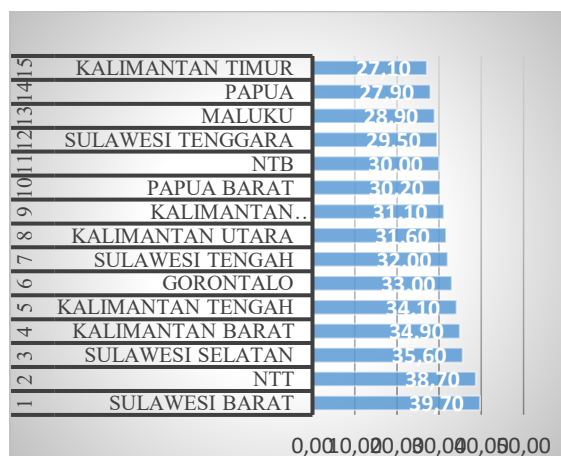
pada anak kecil merupakan salah satu masalah gizi yang sangat memprihatinkan. (Hariani et al., 2023)

Jika dibandingkan dengan masalah gizi lainnya termasuk wasting, wasting

parah, dan balita yang kelebihan berat badan, stunting terus menjadi masalah gizi yang paling umum yang mempengaruhi anak-anak di seluruh dunia. Anak-anak yang mengalami stunting lebih mungkin mengembangkan penyakit kronis saat dewasa, yang menurunkan daya saing dan hasil suatu negara. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018)

Berikut gambar grafik yang menunjukkan data rafik diatas menurut Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2020 prevalensi stunting pada anak balita di Indonesia.

Gambar Grafik 1. Pravalensi Stunting Di Indonesia



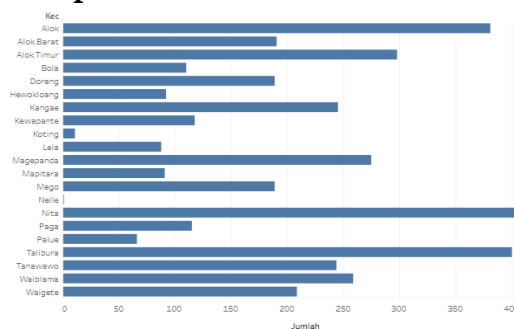
(Sumber : Kementerian Kesehatan, 2022)

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Nusa Tenggara Timur memiliki frekuensi stunting terbesar (38,70%) jika dirinci berdasarkan provinsi. Provinsi Kalimantan Selatan (31,10%), Kalimantan Utara (31,60%), Sulawesi Tengah (32,00%), Gorontalo (33,00%), Kalimantan Tengah (34,10%), Kalimantan Barat (34,90%), Sulawesi Selatan (35,60%),

Papua (27,90%), Nusa Tenggara Barat (30,00%), Sulawesi Tenggara (29,50%), Maluku (28,90%), dan menyusul Papua Barat (30,20). (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022)

Pravelensi stunting yang ada di Provinsi NTT kabupaten sikka merupakan kabupaten yang turut menyumbang angka kasus stunting yang ada di NTT pada tahun 2022, hal ini ditunjukkan pada gambar grafik dibawah ini:

Gambar Grafik 2. Kasus Stunting Di Kabupaten Sikka



(Sumber : BAPELITBANG Kab. Sikka, 2022)

Pada Februari 2022, tercatat sebanyak 3.984 balita atau 17,2% dari total balita di 26 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Sikka mengalami stunting. Dari jumlah tersebut, sebanyak 844 balita (21%) berstatus sangat pendek, sedangkan 3.103 balita (78,6%) berstatus pendek. Meski kondisi tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2021, yakni masing-masing sebesar 25,1%, 19,1%, dan 18,2%, namun masih jauh dari target RPJMD Kabupaten Sikka 2018-2023 yaitu 0% stunting pada tahun 2023. Ironisnya, sebanyak 957 balita yang mengalami stunting berasal dari keluarga yang mampu membiayainya. (BAPELITBANG

Kabupaten Sikka, 2022)

Dalam rangka menanggulangi stunting, Pemerintah Kabupaten Sikka telah melaksanakan sejumlah inisiatif, seperti Posyandu Remaja Pripong Abong di Desa Paubekor, Kecamatan Koting. Kemudian, pembangunan Lepo Gahar Naha Blisa (rumah rehabilitasi stunting) dan Gerakan Orang Tua Asuh. Dalam sambutannya, Bupati Sikka juga menegaskan kembali tujuan Kabupaten Sikka untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi kurang dari 10% pada tahun 2023. (BAPELITBANG Kabupaten Sikka, 2023)

Pemerintah daerah Sikka kemudian mengadopsi inisiatif ini sebagai taktik untuk menanggulangi masalah stunting di daerahnya. Diharapkan hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sikka.

Berdasarkan data dan permasalahan yang telah disajikan dalam latar belakang tersebut, menarik minat penulis untuk mengadakan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana kebijakan penanggulangan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pembangunan ekonomi di kabupaten sikka dan bagaimana kendala - kendala dalam kebijakan penanggulangan stunting terhadap pembangunan ekonomidi kabupaten sikka.

adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui serta mendeskripsikan bentuk kebijakan penanggulangan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pembangunan ekonomi di kabupaten

sikka, dan untuk mengetahui kendala - kendala dalam kebijakan penanggulangan stunting terhadap pembangunan ekonomi di kabupaten sikka.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus bagi ilmu ekonomi pembangunan dalam kaitannya dengan analisis kebijakan penanggulangan stunting terhadap pembangunan ekonomi di kabupaten sikka.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Menerapkan suatu kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana kebijakan tersebut mencapai tujuannya. Tidak lebih, tidak kurang. Dua cara yang tidak umum untuk menerapkan kebijakan publik adalah dengan membuat kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan publik, atau dengan menerapkannya secara langsung sebagai suatu program. (Wahab, 2021)

Kinerja implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh sejumlah gagasan yang dikemukakan oleh banyak pakar. Salah satu teori tersebut adalah teori van Metter dan van Horn adapun indikator implementasi kebijakan yakni: (Manongga et al., 2018)

1). Sasaran Dan Tujuan Kebijakan

Hanya bila tujuan dan pengukuran kebijakan sesuai dengan konteks sosial budaya pada tingkat pelaksana kebijakan, maka efektivitas implementasi kebijakan dapat

dievaluasi.

2). Sumber Daya

Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif sangat penting bagi proses penerapan kebijakan. Sumber daya yang paling penting dalam menentukan efektivitas proses implementasi adalah manusia. Namun, selain sumber daya manusia, waktu dan uang adalah sumber daya lain yang harus dipertimbangkan.

3). Karakteristik Agen Pelaksana

Kelompok formal dan informal yang akan terlibat dalam penerapan kebijakan publik dimasukkan dalam fokus pada agen pelaksana. Hal ini penting karena sifat-sifat yang sesuai dan sesuai untuk agen pelaksana akan memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik kebijakan (publik) diimplementasikan.

4). Sikap Para Pelaksana

Keberhasilan atau kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana.

5). Lingkungan Sosial. Ekonomi Dan Politik

Lingkungan eksternal juga turut berperan dalam keberhasilan kebijakan pemerintah yang ditetapkan. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi semuanya termasuk dalam lingkungan yang dipertimbangkan.

Pembangunan Ekonomi

Tiga nilai kunci, menurut Todaro & Smith, merupakan indikasi keberhasilan

pembangunan ekonomi suatu bangsa: (1) pertumbuhan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (sustenance); (2) peningkatan rasa harga diri manusia sebagai manusia; dan (3) perluasan kebebasan memilih manusia (freedom from _servitude_), yang merupakan hak asasi manusia.(Todaro, 2001)

Stunting

Anak-anak yang mengalami stunting, yaitu kondisi di mana mereka gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis atau berkepanjangan, memiliki tinggi badan lebih pendek dari usia sebenarnya. Karena stunting terjadi saat bayi masih dalam kandungan dan pada awal masa pascapersalinan, hal ini tidak akan terlihat hingga anak berusia dua tahun.(Mercedes de Onis, 2013)

METODE PENELITIAN

Studi ini difokuskan pada permasalahan yang terus menerus dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif.(Sugiyono, 2015) Penggunaan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif ini akan digunakan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam kebijakan penanggulangan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pembangunan ekonomi di kabupaten sikka.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, diperoleh melalui wawancara terhadap berbagai responden yang

meliputi Kepala Dinas Kesehatan, Pegawai Dinas Kesehatan, dan tentang data Ibu hamil yang mengikuti program mencegah stunting. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari website Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka tentang data ibu hamil yang mengikuti program mencegah stunting.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipilih peneliti adalah dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, Verifikasi dan penarikan kesimpulan. (Bungin, 2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penanggulangan Stunting Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Sikka

Implementasi dari kebijakan atas program yang dilakukan Pemerintah kabupaten sikka berdasarkan van Metter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yakni :

a) Tujuan Dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Sikka bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pada perilaku masyarakat sehingga angka stunting di Kabupaten Sikka turun. hal ini sebagaimana diuraikan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten

sikka :

“Sasaran di bentuknya kebijakan penanggulangan stunting ini ditujukan kepada seluruh organisasi, perangkat daerah di tingkat Kabupaten Sikka sampai ke tingkat desa. Hal ini sebagaimana program yang dilakukan melalui program Posyandu Remaja “Pripong Abong”. Kemudian Gerakan Orang tua Asuh serta “Lepo Gahar Naha Blisa” atau rumah pemulihan stunting, tujuannya adalah mencegah dan menanggulangi stunting sehingga dari program tersebut dapat menurunkan angka stunting di kabupaten sikka”.(Hasil wawancara dengan Bapak Gregorius Geovany, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka).

Adapun tujuan program Posyandu Remaja “Pripong Abong”. Kemudian Gerakan Orang tua Asuh serta “Lepo Gahar Naha Blisa” atau rumah pemulihan stunting, ialah mencegah dan menurunkan angka stunting hal ini terbukti dengan adanya program tersebut angka stunting di kabupaten sikka menurun terutama di desa peubekur, kota uneng dan madawat dengan sasaran kebijakan terhadap ibu hamil para pemuda dan pemudi desa dan ibu yang memiliki bayi dan balita untuk diberikan penanganan terhadap bayi yang mengalami stunting dan edukasi terhadap para pemuda pemudi orang tua bayi dan ibu hamil perihal pentingnya pola hidup sehat, menjauhi pergaulan bebas dan serta dengan informasi penyuluhan gizi, serta pentingnya ASI eksklusif.

b). Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Sumber daya dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia untuk mengimplementasikan kebijakan, sumber daya finansial dan sumber daya waktu yang disiapkan oleh pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang menjelaskan bahwa :

“Pemerintah pusat menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan penanggulangan stunting dengan harapan daerah dapat mengikuti informasi tersebut. Kegiatan penanggulangan stunting yang dilaksanakan berasal dari pusat, namun pelaksanaan program diserahkan kepada masing-masing OPD di wilayah kerjanya karena tupoksi dari setiap OPD berbeda-beda. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kebijakan penanggulangan stunting ini telah meliputi unsur pemerintahan, akademisi, praktisi, tim penggerak PKK, dan masyarakat”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Yosefinus Da Cunha, Sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka)

Sumber Daya, sumber daya manusia peran penyuluh yang diwakilkan SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) yang terdiri dari 3 OPD yang terlibat seperti

Dinas Kesehatan dengan fokus pada masalah medis, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tim penggerak PKK, posyandu dengan focus menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya Dinas PPKB dan PPA juga melakukan penyuluhan kepada aparat desa, bidan desa, petugas desa lainnya untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara mencegah stunting yang dapat dilakukan setiap hari dan kapan saja maka kualitas pemberi layanan dan penyuluhan terhadap program tersebut sudah memenuhi kapasitas. Sumber daya finansial sumber seperti APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), DAK (Dana Alokasi Khusus), APBD desa, dan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) untuk tingkat puskesmas untuk menunjang program Posyandu Remaja “Pripong Abong”. Kemudian Gerakan Orang tua Asuh serta “Lepo Gahar Naha Blisa” atau rumah pemulihan stunting. Sumber daya waktu, Pelaksanaan program/kegiatan penanganan stunting dilakukan secara fleksibel atau tidak terjadwal. Beberapa lokasi prioritas penanganan stunting menyatakan bahwa program/kegiatan dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia. DKPPKB (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana) di Kabupaten Sikka sedikitnya sudah melaksanakan 3 agenda kegiatan/program di tahun 2020 sampai

dengan rencana kegiatan/program di tahun 2023 sebagai upaya penanganan stunting di Kabupaten Sikka.

c). Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana pada penelitian ini dikaitkan dengan peran dari para pelaksana kebijakan. Karakteristik badan pelaksana dapat dilihat sesuai dengan peran yang didapatkan oleh badan pelaksana tersebut hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Bahwa :

“Penjelasan tentang peran dari unsur pemerintahan yaitu membuat peraturan daerah, menganggarkan dana terkait penanggulangan stunting, mensosialisasikan peraturan daerah, serta melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan yang berada di lapangan pada saat melaksanakan penanggulangan stunting. selanjutnya peran dari unsur pemerintahan yaitu pemerintah desa berdasarkan adalah membuat Surat Keputusan (SK), menganggarkan dana yang berkaitan dengan penanganan stunting dan mengedukasi masyarakat untuk menangani stunting tersebut”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Gregorius Geovany, Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka)

d). Sikap Pelaksana

Indikator sikap pelaksana adalah tanggapan dari para pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara dari para

informan terkait tanggapan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan stunting di kabupaten sikka sudah memberikan tanggapan yang baik dan tidak ada penolakan. Para pelaksana sudah menerima adanya kebijakan penanggulangan stunting ini. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit bahwa :

“Tentang sikap para pelaksana dan masyarakat terhadap kebijakan dana desa sangat baik. Para pelaksana maupun masyarakatnya memberikan respon dan dukungan yang besar dalam pelaksanaan kebijakan yang menyebabkan implementasi penggunaan dana desa di Desa yang diterapkan program Posyandu Remaja “Pripong Abong”. Kemudian Gerakan Orang tua Asuh serta “Lepo Gahar Naha Blisa” atau rumah pemulihan stunting berjalan dengan sangat baik. Hal ini juga disebabkan karena adanya kebijakan dana desa, masyarakatnya merasakan manfaat yang sangat besar”. (Hasil wawancara dengan ibu Theresia Da Gama, sebagai Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kabupaten Sikka)

Para informan terkait tanggapan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan stunting di kabupaten sikka sudah memberikan tanggapan yang baik dan tidak ada penolakan. Para pelaksana sudah menerima adanya

kebijakan penanggulangan stunting ini yang melalui program Posyandu Remaja "Pripong Abong". Kemudian Gerakan Orang tua Asuh serta "Lepo Gahar Naha Blisa"

e). Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik.

Kondisi ekonomi sangat memengaruhi pelaksanaan penanggulanganstunting. hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

"Dari sisi ekonomimasyarakat terutama yang mempunyai balita harus mempersiapkan diri sepertipengeluaran konsumsi makanan dan keperluan lainnya dengan rata - rata masyarakat dengan ekonomi dibawah memberikan beban tersendiri bagi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, jumlah tanggungan keluarga, pemberian ASI, imunisasi, persalinan, sanitasi, dengan adanya program yang diberikan oleh pemerintah persoalan diatas dan juga penanganan sampah untuk mencegah terjadinya stunting hal tersebut sudah dicover . Selain itu, pemahaman orang tua berpengaruh untuk keberhasilan program pelaksanaan penanggulangan stunting."(Hasil wawancara dengan Bapak Gregorius Geovany, Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka)

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, keadaan masyarakat dari

lingkungan ekonomi yang dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang ekonomi rendah sehingga tercapainya pencegahan penanggulangan stunting jadi terhambat dengan adanya peran pemerintah melalui program dan kebijakan pemerintah dengan mengcover seluruh biaya terkait kebutuhan masyarakat terhadap persoalan stunting maka masyarakat sangat terbantu tidak hanya hal tersebut adapun kegiatan social dan politik yang dilakukan yakni pemberian sembako murah, bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

Bantuan pemerintah seperti RTLH diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu atau rentan miskin, dan itu harus sudah masuk di data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dukungan politis juga memengaruhi pelaksanaan penanggulangan stunting. Faktor politik memengaruhi kebijakan dengan bertanggungjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat ditampung dan diusahakan, seperti rumah tidak layak huni yang kemudian akan diberikan bantuan dari pemerintah.

Adanya langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah kabupaten sikka terhadap evaluasi program Posyandu Remaja "Pripong Abong". Kemudian Gerakan Orang tua Asuh serta "Lepo Gahar Naha Blisa" atau rumah pemulihan stunting dengan menggelar diskusi panel dan manajemen audit kasus stunting, bahwa tujuan dari audit kasus stunting bukan hanya untuk mengidentifikasi penyebab, tetapi juga untuk diikuti dengan intervensi

program yang tepat diantara program program tersebut adalah program Posyandu Remaja "Pripong Abong". Kemudian Gerakan Orang tua Asuh serta "Lepo Gahar Naha Blisa" atau rumah pemulihan stunting sehingga berdasarkan bentuk evaluasi tersebut dapat menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mengatasi masalah stunting, sesuai dengan hasil audit kasus yang dilakukan oleh tim pakar.

Implementasi kebijakan penanggulangan stunting dalam program Posyandu Remaja "Pripong Abong". Kemudian Gerakan Orang tua Asuh serta "Lepo Gahar Naha Blisa" atau rumah pemulihan stunting melibatkan banyak pemangku kepentingan dan melalui beberapa tahapan penting termasuk organisasi pemerintah, nonpemerintah, dan masyarakat selaku sasaran. Kebijakan ini dirancang untuk menurunkan prevalensi stunting melalui program yang ada dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sikka prevalensi diturunkan melalui intervensi gizi, peningkatan layanan kesehatan, dan edukasi kepada masyarakat, menjadi aspek penting. Upaya penanggulangan stunting dengan memberikan dukungan sumber daya finansial kepada masyarakat memberikan dampak positif implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik.

Melalui sinergi yang baik antara agen pelaksana dan keterlibatan masyarakat, untuk menurunkan angka stunting

dapat dilakukan secara lebih optimal, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai dengan lebih cepat dan efektif. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, beberapa hambatan masih menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan ini.

2. Kendala - Kendala Dalam Kebijakan Penanggulangan Stunting Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Sikka.

Faktor yang menjadi kendala dalam kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sikka adanya aspek internal seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka bahwa:

"Kendala dalam komunikasi antar instansi sehingga tidak jarang menimbulkan adanya miss komunikasi. Selain itu, faktor internal lainnya yaitu sumber daya manusia dari perangkat kerja disetiap puskesmas yang diterapkan program Posyandu Remaja "Pripong Abong". Kemudian Gerakan Orang tua Asuh serta "Lepo Gahar Naha Blisa" yang belum sesuai dengan kapasitas maupunkapabilitas karena minimnya pengetahuan dan informasi". Hasil wawancara dengan bapak Bapak Gregorius Geovany, Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka).

Faktor selanjutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan bahwa :

“Jumlah sumber daya manusia pada Puskesmas dalam melakukan sosialisasi program penurunan dan penanggulangan stunting masih kurang jumlahnya dan didukung oleh kondisi desa yang terisolasi mengakibatkan petugas kesehatan kesulitan untuk melakukan promosi kesehatan. Faktor penghambat lainnya yaitu, sumber daya finansial stunting membutuhkan dana yang besar sedangkan dana yang didapatkan masih kurang seperti untuk melengkapi fasilitas kesehatan penunjang”. (Hasil wawancara dengan Yosefinus Da Cunha, Sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sikka)

Kendala - Kendala Dalam Kebijakan Penanggulangan Stunting Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Sikka Tingkat keterisolasian yang tinggi menyebabkan banyak keterbatasan aksesibilitas seperti layanan kesehatan, dan layanan pendidikan yang sangat potensial untuk masyarakat semakin terpuruk pada kemiskinan dan keterbelakangan akses jalan menuju posyandu menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat untuk datang mengikuti program pemerintah dan adapun banyak masyarakat yang masih memperayai mitos dan tradisi membuat terhambatnya pelaksanaan penanggulangan stunting di kabupaten sikka.

Hal ini menjadi salah satu bentuk konkrit dalam turunan kemiskinan dan keterbelakangan dari persoalan stunting di Kabupaten Sikka. Dalam hal ini

implementator kebijakan harus lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham pentingnya pencegahan stunting.

Kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Sikka bertujuan untuk menekan angka dan peanggungan stunting di Kabupaten Sikka. Adanya program upaya penurunan dan penanggulangan diharapkan angka stunting dapat mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Maka dapat dikatakan implementasi kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Sikka ini telah terlaksana dengan baik akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya beberapa kendala.

Menurut Todaro & Smith menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance), (2) meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.(Todaro, 2001) dari ketiga nilai pokok tersebut program Posyandu Remaja “Pripong Abong”. Kemudian Gerakan Orang tua Asuh serta “Lepo Gahar Naha Blisa”. Merupakan tujuan dari bentuk pembangunan ekonomi di Kabupaten Sikka.

Hal ini dapat dilihat pada poin pertama kemampuan masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan pokoknya, dengan adanya program tersebut masyarakat terbantu untuk tidak mengeluarkan biaya dalam mengikuti program penanggulangan stunting hal ini dikarenakan segala kegiatan dalam penanggulangn stunting dicover oleh pemerintah daerah Kabupaten Sikka, sehingga masyarakat berfokus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Pada poin dua pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu, yakni dengan adanya bantuan pemerintah dalam program tersebut yang mengakibatkan penurunan angka stunting di Kabupaten Sikka rasa bangga ini akhirnya lahir dari adanya program tersebut, rasa bangga kemudian muncul dengan Bantuan pemerintah seperti RTLH diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu atau rentan miskin, sehingga dengan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sikka maka tingkat kepercayaan diri masyarakat akan semakin tinggi hal ini dapat didasarkan kepada tingkat kualitas masyarakat yang akhirnya berpendidikan dan memisahkan kebiasaan yang menghalangi kegiatan - kegiatan program dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Sikka,

Poin ketiga, yakni kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Output dari program

penanggulangan stunting yang akhirnya dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Sikka memberikan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan seperti mensukseskan kegiatan pemerintah dengan banyak keterlibatan para remaja secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, diselingi dengan kegiatan pembinaan rohani dan olahraga.

Maka pemerintah kabupaten sikka dapat menyusun strategi pencegahan stunting di kabupaten sikka sehingga perlu dipakai agar pencegahan stunting dapat berjalan dengan baik yaitu dengan mengatasi penyebab masalah stunting yang kurang memadai meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, meningkatkan kinerja kelembagaan dengan kegiatan pelatihan kader kesehatan, menciptakan inovasi baru seperti konsep kesehatan sadar hidup sehat, memanfaatkan dana desa yang ada untuk mengadakan infrakstuktur kesehatan, memanfaatkan dana dari pemerintah tepat sasaran, mengadakan sanitasi yang baik dan sehat, peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan khursus ketrampilan, edukasi kepada remaja untuk merencanakan kehamilan dan mengedukasi masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi program-program pemerintah.(Paskalia Aek et al., 2023)

SIMPULAN

Program Pemerintah dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Sikka yakni program Posyandu Remaja "Pripong Abong". Kemudian Gerakan Orang tua Asuh serta "Lepo Gahar Naha Blisa" atau rumah pemulihan stunting melahirkan hubungan struktur birokrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Puskesmas Peubekur, Puskesmas Kota Uneng Dan Puskesmas Madawat cukup baik dan jelas. Telah adanya pembagian tugas dan wewenang pada masing-masing bidang. Selain itu, hubungan kerjasama antar instansi tersebut juga telah berjalan baik. Tercapainya implementasi kebijakan dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Sikka melalui aspek tujuan dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana dan lingkungan ekonomi social dan politik, ditransmisikan dan berjalan dengan baik seperti adanya penyuluhan stunting, pemberian bantuan makanan bergizi pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan rumah tidak layak huni.

Kendala yang dihadapi dalam proses penyampaian informasi antar pelaksana kebijakan masih ditemukan adanya beberapa kendala yaitu seperti terjadi miss komunikasi pada saat penyampaian informasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi selanjutnya yaitu konsistensi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dalam melakukan komunikasi secara internal dan eksternal. Jumlah sumber daya manusia pada

Puskesmas di Kabupaten Sikka dalam melakukan sosialisasi program penurunan dan penanggulangan stunting masih kurang jumlahnya. Maka dari itu, menyebabkan implementasi kebijakan kurang berjalan secara optimal. Selanjutnya faktor penghambat implementasi kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Sikka yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal serta faktor geografis.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Aksa, A. F., Lake, Y., Timo, F., Lika, E., Amleni, W., & Bria Seran, R. (2025). Kontribusi Akuntan Pendidik Menuju Indonesia Emas 2045 Dengan Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 3(2), 27-45. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v3i2.331>
- Hariani, E., Widyawati, R. F., Muhammad, R. T., Dwimastadji W, M., & Dewa L, B. (2023). Pencegahan Stunting dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di 11 Kabupaten Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 949-956. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.3187>
- Manongga, A., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di

- Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-10.
- Mercedes de Onis. (2013). The world health organization's global target for reducing childhood stunting by 2025: Rationale and proposed actions. *Maternal and Child Nutrition*, 9(S2), 6-26. <https://doi.org/10.1111/mcn.12075>
- Nur Bhakti Pertiwi, W. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Produk Fashion Lokal (Studi Kasus Thenblank). *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 2(2), 37-45. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v2i2.176>
- Paskalia Aek, Y., Tungga, C., & Tameno, N. (2023). Analisis Strategi Penanggulangan Stunting Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Kupang. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(10), 1662-1673. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i10.528>
- Buku**
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Todaro. (2001). *Ekonomi Pembangunan* (9th ed.). Erlangga.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Website**
- BAPELITBANG Kabupaten Sikka. (2022). *Stunting Kabupaten Sikka: Tantangan dan Peluang Menuju Nol Persen*. www.bapelitbang.sikkakab.go.id. <https://www.bapelitbang.sikkakab.go.id/d/A/stunting-kabupaten-sikka-tantangan-dan-peluang-menuju-nol-persen>
- BAPELITBANG Kabupaten Sikka. (2023). *Komitmen Bupati Sikka menurunkan Angka Prevalensi Stunting dibawah 10%*. www.bapelitbang.sikkakab.go.id.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia*. [KEMENTRIAN KESEHATAN.Go.Id](http://www.kemkes.go.id), 1. <https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-%0AIndonesia/Profil-Kesehatan-2021.pdf>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Kementerian Kesehatan Rilis Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022*. [Upk.Kemkes.Go.Id](http://upk.kemkes.go.id). <https://upk.kemkes.go.id/new/kementerian-kesehatan-rilis-hasil-survei-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2022>